**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2006-2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**PROPOSAL SKRIPSI

****

Oleh:

**Ikrar Diena Bakti**NIM. 12402183292

**PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOVEMBER 2022**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN INDEKS PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TULUNGAGUNG PERIODE 2006-2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Untuk Menyusun Skripsi

****

Oleh:

**Ikrar Diena Bakti**NIM. 12402183292

**PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOVEMBER 2022**

1. **Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Karena Sebagian besar mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah sepantasnya segala bentuk aktivitas perekonomiannya sesuai dengan aturan atau norma adat isiadat yang telah ditetapkan oleh agama Islam dimana aturan atau norma tersebut bercermin pada al-Qur’an dan al-Hadits. Dengan ini membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi semakin pesat yang ditandai dengan meningkatnya berbagai indikator ekonomi. Indikator ekonomi seperti Tingkat Pendapatan Perkapita, Tingkat Pendapatan Nasional, Tingkat Kesejahteraan Penduduk, dsb. Tidak dapat dipungkiri akan bertumbuhnya perekonomian bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak dengan tuntutan ekonomi ilahiyah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara atau wilayah dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekomoni mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Sirojuzilam dan Mahalti, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun system ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang dan pemerataan ekonomi yang lebih besar.[[1]](#footnote-1) Satu fakta yang tak terbantahkan, pertumbuhan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu semakin meningkatnya kemakmuran atau taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat, dan terbukanya kesempatan kerja baru bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang dicerminkan pada Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha.[[2]](#footnote-2)

Secara singkat, “pertumbuhan ekonomi” adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses”, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini yang dimaksud output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan ouput per kapita harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak.[[3]](#footnote-3)

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan ekonomi, perlu disajikan suatu data statistik secara berkala, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan perberdayaan dan pembangunan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Bruto (PDB) atau bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu negara dalam periode tertentu. Sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).[[4]](#footnote-4)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Jadi, instrument untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, data statistik yang diperlukan bukan PDRB atas dasar berlaku, melainkan adalah PDRB atas dasar harga konstan. Karena, harga berlaku akan dipengaruhi dengan inflasi pada tahun berjalannya sehingga menyebabkan harga berubah-ubah dengan mengikuti tingkat inflasi, oleh sebab itu perhitungan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah lebih baik jika menggunakan atas dasar harga konstan, dengan menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasarnya.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang taraf pertumbuhan ekonominya tergolong bertumbuh. Berdasarkan Data yang telah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dibantu oleh Susenas Kabupaten Tulungagung, jumlah PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2006-2021 persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menunjukkan hasil positif pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1:

Tabel 1.1

Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar (PDRB)

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta)** |
| 2006 | 6.196,73 |
| 2007 | 6.552,88 |
| 2008 | 6.936,74 |
| 2009 | 7.353,50 |
| 2010 | 16.776,32 |
| 2011 | 17.845,22 |
| 2012 | 18.999,03 |
| 2013 | 20.144,38 |
| 2014 | 21.242,07 |
| 2015 | 22.326,62 |
| 2016 | 23.446,44 |
| 2017 | 24.637,36 |
| 2018 | 25.920,20 |
| 2019 | 27.299,80 |
| 2020 | 26.455,76 |
| 2021 | 27.390,42 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2021 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Tulungagung pada halaman websitenya, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB terbesar yaitu terjadi di tahun 2010 dengan selisih peningkatan 9,42 juta, yang bahkan nilai selisihnya lebih besar dari PDRB tahun sebelumnya (2009) yang hanya 7,35 juta.

Sedangkan untuk menghitung besaran tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan rumus berikut:

Keterangan:

*X* = Laju Pertumbuhan Ekonomi,

PDRBn = Nilai PDRB Periode Tahun Dasar,

PDRBt = Nilai PDRB Periode Tahun Sebelumnya.

Berikut ini hasil perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung:

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Periode Tahun

2006-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Pertumbuhan Ekonomi (Persen)** |
| 2006 | 5,48 |
| 2007 | 5,75 |
| 2008 | 5,86 |
| 2009 | 6,01 |
| 2010 | 128,14 |
| 2011 | 6,37 |
| 2012 | 6,46 |
| 2013 | 6,03 |
| 2014 | 5,45 |
| 2015 | 5,1 |
| 2016 | 5,01 |
| 2017 | 5,08 |
| 2018 | 5,21 |
| 2019 | 5,21 |
| 2020 | -3,09 |
| 2021 | 3,53 |

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. tetapi terjadi minus pada saat terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang menunjukkan anjloknya tingkat perekonomian daerah minus 3,09 persen dari tahun sebelumnya yang menunjukkan nilai positif 5,21 pada tahun 2019 disaat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Tetapi 1 tahun setelah masuknya pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami pertumbuhan positif. Tidak lagi di angka minus 3,09 persen seperti di tahun sebelumnya melainkan tumbuh positif di angka 3,53 persen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut pemerintahan daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah. Era Otonomi Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, akan tetapi benar-benar mempunyai kekuasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era otonomi bisa dikatakan terpasung. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai kegiatan pelayanan public guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik.[[5]](#footnote-5)

Menurut Suparmoko, pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indicator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) sendiri ialah bagian dari kebijakan fiscal, yang tercermin dari dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerrah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.[[6]](#footnote-6)

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah,[[7]](#footnote-7) dalam hal ini Kabupaten Tulungagung.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat.

Berdassarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. Pendapatan Asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2006-2021 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli Daerah (Juta)** |
| 2006 | 36.223,99 |
| 2007 | 50.994,78 |
| 2008 | 53.784,15 |
| 2009 | 82.325 |
| 2010 | 94.371 |
| 2011 | 16.2162 |
| 2012 | 17.4982 |
| 2013 | 27.6578 |
| 2014 | 30.9646 |
| 2015 | 34.2577 |
| 2016 | 503.103,39 |
| 2017 | 453.127,26 |
| 2018 | 453.127,26 |
| 2019 | 486.360,90 |
| 2020 | 510.548,15 |
| 2021 | 949.079,57 |

*Source: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung*

Dilihat pada tabel 1.1 di atas, secara umum kinerja Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, yang naik cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini sama dengan teori dari Saragih, yang menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah naik maka pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Akan tetapi, pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 ada salah satu kontra antara variable Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020, nilai realisasi PAD naik 4,97 persen atau selisih 24,19 juta dengan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan minus 3,09 persen pada tahun 2020. Potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung baik dari segi industri maupun perdagangan, serta dalam bentuk barang dan jasa, potensi ini tentu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui pajak-pajak maupun retribusi-retribusi yang berhubungan dengan industri dan perdagangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui secara pasti apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi barometer pertumbuhan ekonomi, faktor lain yaitu penduduk. Penduduk juga dianggap penting sebagai motor penggerak pembangunan. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan Sumber Daya Manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik.

Menurut Abdullah (2015), Pada Jurnal Ilmiahnya menegaskan faktor utama pertumbuhan ekonomi dari suatu negara yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah Angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak Angkatan kerja yang dimiliki suatu region berarti tingkat produktifitas tenaga kerja juga semakin besar, dengan kata lain semakin banyak tingkat populasi penduduk dalam satu wilayah maka akan dapat meningkatkan potensi pasar domestik wilayah tersebut.[[8]](#footnote-8)

Kabupaten Tulungagung dengan luas daerahnya 1.055,56 kilometer persegi, dibandingkan jumlah penduduk, maka kepadatan jumlah penduduk di Tulungagung saat ini berkisaran 1.000 jiwa per kilometer persegi. Untuk data jumlah dan pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Tingkat Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tulungagung Periode 2006-2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Penduduk** |
| 2006 |  |
| 2007 |  |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| 2010 |  |
| 2011 |  |
| 2012 |  |
| 2013 |  |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| 2016 |  |
| 2017 |  |
| 2018 |  |
| 2019 |  |
| 2020 |  |
| 2021 |  |

1. **Rumusan Masalah**
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung?,
3. Apakah Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung?,
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung?.
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung,
7. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung,
8. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung.
9. **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan literature bagi penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai kajian ilmu pengembangan dalam ekonomi khususnya dalam ekonomi pemerintahan.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Penulis

Dapat mengetahui implementasi *Gross Domestic Regional Product* atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai instrumen pengukur tingkat ketimpangan suatu daerah.

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan jiwa semangat berkerja dan membantu dalam meningkatkan perekonomian.

1. Bagi Pemerintahan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Bagi Peneliti Mendatang

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai pijakan penelitian secara mendalam yang berkaitan dengan tema penelitian yang relevan.

1. **Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**
2. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup serta Batasan agar lebih terarah, focus dan tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas. Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah variable yang akan diteliti terdiri dari 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Adapun yang menjadi variabel bebas atau independen (X) dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai (X1), Garis Kemiskinan (X2), & Indeks Pembangunan Manusia (X3). Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau variable dependen (Y) dalam penelitian ini ialah *Gross Domestic Regional Product* atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1. Keterbatasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu batasan masalah yang bertujuan agar permasalahan yang akan diteliti lebih jelas dan terarah serta tidak keluar dari pembahasan yang ada. Adapun yang menjadi pembatasan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus meneliti yang berkaitan dengan PDRB atas harga konstan yang menjadi alat untuk mengukur tingkat produksi barang dan jasa pada suatu daerah (*regional*).
2. Pembahasan variabel bebasnya meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka yang merupakan indikator dari TPT atau *unemployment rate*, rasio garis kemiskinan (*Poverty Rate*), dan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) terhadap *Gross Domestic Regional Product* atau PDRB di Kabupaten Tulungagung yang biasa masuk pada data statistik ekonomi dan perdagangan periode tahun 2010-2021 yang telah diolah dan dirangkum oleh BPS Kabupaten Tulungagung.
3. **Definisi Operasional**

Penjelasan konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa penelittian yang dimaksud dengan pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Garis Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Tulungagung sebelum adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, angka Garis Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara ketiga variabel bebas tersebut (TPT), (GK), dan (IPM) terhadap Variabel terikat (PDRB). Agar hasil semakin maksimal, peneliti juga mengambil sampel data serta membandingkan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi variabelnya.

1. **Landasan Teori**
2. Kerangka Teori
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam Angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.[[9]](#footnote-9)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

Hasil dari perhitungan tingkat terbuka yang dilakukan oleh BPS dan dibantu oleh Sakernas dan Sensus Penduduk menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indicator ini, maka semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indicator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti: resesi, perubahan siklus bisnis, teknologi, dan lain-lain.[[10]](#footnote-10)

Perhitungan statistik yang telah dilakukan untuk mengetahui data dari TPT menjadi penting untuk diketahui masyarakat dan terutama pemerintahan, karena merupakan indikator penilaian sosial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

1. Garis Kemiskinan (GK)

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan pendapatan dan konsumsi yang rendah, tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat Pendidikan, kesehatan, termasuk mereka yang tidak berdaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan berbagai masalah pembangunan manusia.

Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yang dihitung selama satu bulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garik Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Di Indonesia, kemiskinan merupakan maslaah yang sedang dihadapkan oleh pembangunan nasional dalam meningkatkan kinerja perekonomian guna terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[[11]](#footnote-11)

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan hidup manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur Panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh Pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Pembangunan manusia tidak hanya sebatas hal tersebut. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan social sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia. [[12]](#footnote-12)

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur Panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehata, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya belu masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata bersarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

(Hadi Sasana, 2006) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi yang dikeluarkan setiap daerah dalam periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto dapat digunakan sebagai alat ukur, untuk mengetahui besar kecilnya ketimpangan sosial pada suatu daerah. Oleh karena itu, Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia, termasuk antara lain: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, dan Sumber Daya Alam non-Hayati.

1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan yang terdahulu pernah dilakukan oleh Yudha (2013), Aristina dkk. (2017), Wirawan dan Arka (2015), Yanthi dan Marhaeni (2015), serta Yacoub (2012), memperoleh hasil bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Maka dengan meningkatnya pengangguran, penduduk akan menjadi semakin tidak produktif, mempengaruhi penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistensinya, dan semakin tidak terpenuhi kebutuhan dasar dan akan meningkatkan angka kemiskinan. Jadi dapat dikatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Garis Kemiskinan mempunyai pengaruh yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Murniasih, dkk (2014) dalam jurnalnya, yang berjudul Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Probinsi Bali Tahun 2003-2012, mendapatkan hasil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang kuat terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hal ini dapat dikatakan, dengan meningkatnya angka pengangguran maka Produk Domestik Regional Bruto akan semakin berkurang. Karena tanpa Sumber Daya Manusia, produk barang maupun jasa tidak mungkin terproduksi. Dan dengan banyaknya pengangguran Produk Domestik Regional Bruto tidak akan bertambah.

Pembahasan berbeda pernah dilakukan oleh Tino Handayani, Didik Susetyo, dan M. Syirod Saleh dalam jurnal yang dibuatnya yang berjudul Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Dengan menggunakan hasil estimasi regresi data panel dengan metode *Fixed Effect*. Indeks Pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan mengenai pengaruh kemiskinan, penulis mengkajt penelitian yang pernah dilakukan oleh Vincetin Zendrato, pada skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam skripsinya tersebut, peneliti mengambil 3 variabel, yaitu: PDRB (Provinsi), Pengangguran, dan Kemiskinan. Hasil analisis yang dilakukan oleh Vincetin Zendrato mendapatkan hasil Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Maka dapat diartikan, dengan banyaknya masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokok maka permintaan pasar akan berkurang, dan produk barang dan jasa yang dikeluarkan akan semakin sedikit untuk menyeimbangkan kebutuhan pasarnya.

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alur gambaran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang mengarahkan asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam kerangka konseptual inilah permasalahan pada variabel-variabel akan dijelaskan secara lebih terperinci sehingga mampu menerangkan dan merujuk pada suatu permasalahan yang akan diteliti.

Isi dari penelitian ini akan menggunakan 3 Variabel independen (X­) dan 1 variabel dependen (Y). Dimana variabel bebas yang pertama (X1) adalah Tingkat Pengangguran Terbuka, variabel bebas yang kedua (X2) adalah Garis Kemiskinan, dan variabel bebas yang ketiga (X3) adalah Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya (Y) adalah Produk Domestik Regional Bruto. Jadi hubungan antar variabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Garis Kemiskinan

(X2)

Indeks Pembangunan

Manusia (X3)

Tingkat Pengangguran Terbuka

(X1)

H3

H2

H1

Produk Domestik Regional Bruto

(Y)

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan asumsi atau asumsi awal pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang belum terbukti kebenarannya. Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada proposal penelitian ini temuan hipotesis yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Garis Kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
3. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. **Metode Penelitian**
5. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan ini menggunakan angka dalam pengujian hipotesisnya. Data yang diperoleh dari hasil rangkuman perhitungan BPS Daerah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2010-2021 serta menggunakan alat bantu SPSS 25 untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang akan diteliti.

Sedangkan Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif Dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif ini, bertujuan untuk mengetahui sebab akibat hubungan atau pengaruh antar variabel.

1. Sumber data, variabel, dan skala pengukurannya.
2. Sumber data

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang diperoleh dengan tujuan dan maksud tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang dipublikasikan untuk umum sehingga masyarakat juga dapat mengakses dengan tujuan tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio Garis Kemiskinan (GK), Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yang semuanya diambil berdasarkan wilayah regional Kabupaten Tulungagung Tahun 2010-1021 di situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.

1. Variabel Penelitian

Isi dari penelitian ini terdapat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini juga terdapat variabel bebas yang digunakan untuk bagaimana mengetahui pengaruh terhadap variabel terikatnya. Peneliti mengambil variabel TPT Kabupaten Tulungagung sebagai variabel bebas pertama (X1), GK Kabupaten Tulungagung sebagai variabel bebas kedua (X2), dan IPM Kabupaten Tulungagung sebagai variabel bebas ketiga, karena melihat lapangan bahwa kedua rasio tersebut saling terikat atas kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Sedangkan PDRB sebagai variabel terikat (Y) karena beberapa sumber teori telah menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu instrumen dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

1. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur rentan interval dimana dalam pengukurannya akan menghasilkan data kuantitatif, maka dari itu peneliti menggunakan skala pengukuran nol mutlak.

1. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik survei yang telah dilakukan oleh Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang kemudian data tersebut dirangkum oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada situs resminya dalam periode Maret dan September setiap tahunnya.

Sedangkan instrumen dalam penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu: (1) TPT yang dihitung dari persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja daerah, (2) GK yang merupakan persentase jumlah masyarakat yang sulit dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, (3) IPM termasuk angka harapan hidup; angka melek huruf; rata-rata lama sekolah; dan penegluaran riil per kapita yang disesuaikan, dan (4) PDRB yang dihitung dari jumlah barang / jasa yang telah dikeluarkan pada periode tertentu.

1. Teknik Analisis Data
2. Uji Multikolinieritas

Dengan melakukan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji hubungan variable bebas dalam uji regresi berganda. Serta digunakan untuk menghindari kesalahan pada uji parsial dalam menentukan kesimpulan.

1. Uji Model Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan antara variable bebas dan variable terikat untuk dapat diketahui hubungannya. Persamaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Y = a + *b*1 *X*1 + *b*2 *X*2 + E

Dimana:

Y = *Gross Domestic Regional Bruto* (PDRB)

A = kostanta

*b1b2* = koefisien variable masing-masing

*X1* = Tingkat Pengangguran

*X2* = Garis Kemiskinan

E = *error term* (variable Pengganggu) atau residual

1. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan mengidentifikasi dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan yang terdapat pada variable X terhadap variabel Y

1. Uji F

Uji F dalam statistik bertujuan untuk menunjukkan apakah vcariabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

*H0* : Tingkat Pengangguran, Garis Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H1* : Tingkat Pengangguran, Garis Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

1. Uji t

Uji t pada statistik bertujuan untuk menunjukkan pengaruh antar variabel bebas dalam memperjelas variabel terikat. Adapun Hipotesis dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

*H0* : Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H1* : Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H0* : Garis Kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H1* : Garis Kemiskinan Berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H0* : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

*H1* : Indeks Pembangunan Manusia Berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung

1. Uji Koefisien Determinasi (R *square*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar sumbangan variabel terikat yang menunjukkan naik turunnya Y terhadap variabel terikat bebas dan dipengaruhi oleh linier X. Jika semakin besar nilai determinasi, maka semakin baik pula garis yang terbentu, Berlaku Juga sebaliknya. Hasil ini dapat dilihat dari Eviews pada tabel *Model Summary*. Untuk mendapatkan hasil seberapa besar presentase maka nilai pada kolom *Adjusted R* *square* dikalikan dengan 100%

1. **Sistematika Penulisan Skripsi**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pemaparan menegenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pemaparan mengenai kajian teori, bahasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Merujuk pada penelitian yang terdahulu guna mendukung asumsi sehingga penelitian yang dilakukan lebih kredibel.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pemaparan mengenai pendekatan serta jenis penelitian, populasi, sampel, data, variable, skala pengukuran, Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan meliputi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta pembahasannya.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Pemaparan mengenai isi bahasan rumusan masalah yang pertama sampai rumusan masalah yang terakhir dengan lebih spesifik.

**BAB VI : PENUTUP**

Pemaparan mengenai apa yang telah disimpulkan dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bachrawi, Sanusi. 2004. *Penghantar Ekonomi Pembangunan*.  
 (Jakarta: Rineka Cipta).

Sumarni, Murti dkk. 2014. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*.  
 (Yogyakarta: Liberty).

Asyhadie, Zaeni. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan*.  
 (Jakarta: Prenada Media Group).

Bhowi, D. 2018. *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Diakses pada 30 April 2022, dari [https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga- kerja.html#:~:text=TPT%20(Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka)%20adal ah,kurang%20dari%2035%20jam%20seminggu](https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-%09kerja.html#:~:text=TPT%20(Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka)%20adal ah,kurang%20dari%2035%20jam%20seminggu)).

Badan Pusat Statistik. 2022. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. Diakses pada 31 April 2022, dari [https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan- ketimpangan.html](https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-%09ketimpangan.html).

Suryamin. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*.  
 (Jakarta: Badan Pusat Statistik).

1. Syed Nawab Haidar Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 133. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Boediono, *Toeri Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2018) hlm. 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. BPS Kabupaten Tulungagung, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-20013*, (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2014) hlm. 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga kerja terhadap PDRB Di Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makasar, 2012), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2007), hlm. 52 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Yani, *Op. Cit*, , hlm. 51-52 [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdullah Muid, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Gresik Tahun 1994-2013)*, Jurnal Ilmiah, 2015, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bhowi Dewananda, *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhahap kemiskinan 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018). [↑](#footnote-ref-9)
10. Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka, <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT%20(Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka)%20adalah,kurang%20dari%2035%20jam%20seminggu>) , diakses 30 April 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pusat Statistik, Kemiskinan dan Ketimpangan, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>, diakses 31 April 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suryamin, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-12)